

PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSI ERA SOCIETY 5.0

Nanda Alfian Kurniawan

Universitas Negeri Malang

Email: alfan.kurniawan.1801116@students.um.ac.id

Ummu Aiman

Universitas Negeri Malang

Email: ummu.aiman.1801118@students.um.ac.id

Abstract: Era Society 5.0 has had a significant impact on the delivery of education for students in Indonesia. The increasing use of information technology as a result of civilization era society 5.0 presents opportunities and challenges for educators in each education unit. The implementation of appropriate inclusive education will help students in achieving optimal potential development according to the conditions and needs in the community. Student independence is a key concern for educators in inclusive education. This is important to note because students certainly will not be separated from the circumstances that occur around them, especially in the era of society 5.0. Therefore, the era of society 5.0 finally opened a new paradigm for the implementation of inclusive education in Indonesia. This study aims to provide an overview of the implementation of inclusive society era education 5.0. The method used in this research is literature study. Data sources in the form of research articles, journals, and books that are relevant to research. Data analysis techniques use content analysis. The results showed that the era of society 5.0 brought a paradigm for inclusive education in terms of educators, students and educational devices.

Keyword : Inclusive education, Era Society 5.0.

Abstrak : Era *Society* 5.0 telah memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di Indonesia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai hasil peradaban era *society* 5.0 menghadirkan peluang dan tantangan bagi pendidik pada tiap satuan pendidikan. Salah satu bentuk satuan pendidikan yang merasakan dampak tersebut adalah pendidikan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tepat akan membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan potensi optimal sesuai kondisi dan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Kemandirian peserta didik menjadi perhatian kunci pendidik di pendidikan inklusi. Hal ini penting diperhatikan sebab peserta didik tentunya tidak akan terlepas dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya, terlebih di era *society* 5.0. Oleh karena itu era *society* 5.0 akhirnya membuka paradigma baru bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi era *society* 5.0. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber data berupa artikel penelitian, jurnal-jurnal, dan buku yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era *society* 5.0 membawa paradigma bagi pendidikan inklusi ditinjau dari pendidik, peserta didik dan perangkat pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan inklusi, Era *Society* 5.0.

PENDAHULUAN

Pada dua tahun terakhir pendidikan di Indonesia telah mengalami dinamika baru, yaitu pergantian era semula revolusi industri 4.0 menjadi era *society* 5.0. Perkembangan teknologi informasi saat ini dianggap menjadi pembuka gerbang peradaban era *society* 5.0. (Rakhmawati, 2017). Konsep ini berkembang pada awalnya di Jepang, yang menyebutkan bahwa era *society* 5.0 adalah *“A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space”* (Al Faruqi, 2019).

Situasi yang terjadi di era *society* 5.0 dapat ditinjau dari terjadinya perubahan fungsi sosial menuju fungsi teknologi informasi dalam setiap aktivitas kehidupan di berbagai aspek, termasuk pendidikan. Penggunaan media belajar dan pembelajaran berbasis *online* menjadi salah satu ciri khas yang tampak pada pendidikan era *society* 5.0 dan mampu menjaga fungsi pendidikan saat ini. Pendidikan menjadi salah satu fungsi sosial (Putra, 2019) yang berjalan seiring dengan peradaban termasuk peradaban di era *society* 5.0.

Pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara utuh meliputi aspek fisik psikis, jasmani rohani dan sosial (UU RI, 2003). Peserta didik memiliki keunikan tersendiri dalam tiap satuan pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan berupaya memfasilitasi pengembangan dan pembimbingan bagi keunikan peserta didik agar memiliki nilai unggul dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan oleh pemerintah yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya agar mereka mendapatkan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal ilmu pengetahuan. Pendidikan inklusi menjadi wadah bagi pemerataan pengembangan potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Darma & Rusyidi, 2015). Selain itu, penguatan karakter juga menjadi tujuan dari pendidikan inklusi.

Peserta didik dalam pendidikan inklusi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi yang menyebutkan bahwa pembelajaran dilakukan dalam satu lingkungan pendidikan

bersama-sama dengan peserta didik seperti umumnya. Pendidikan inklusi dapat dilakukan mulai pendidikan dasar hingga menengah (Efendi, 2018). Segala bentuk penyelenggaraan pendidikan di masyarakat memiliki tujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang di butuhkan peserta didik di masa mendatang (Ajisuksmo, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian literatur yang relevan dengan penelitian dan bertujuan memberikan deskripsi kepada pembaca (Rondiyah et al., 2017; Sugiyono, 2010). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analys) untuk memperoleh data yang tepat mendukung tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan berupa daftar *chek list* untuk mengelompokkan sumber data berdasarkan fokus variabel penelitian.

HASIL

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia masih dalam kategori rendah bahkan masih menjadi sebuah fenomena (Darma & Rusyidi, 2015). Salah satunya

berdasarkan data menurut PBB yang menunjukkan bahwa 90 % anak-anak disabilitas di negara berkembang masih tidak bersekolah. Situasi ini di akibatkan oleh kebijakan pemerintah (Efendi, 2018), menejemen kurikulum pendidikan (Mudjito & Ashar, 2017) dan perhatian masyarakat terhadap status sekolah inklusi yang ada disekitarnya. Bahkan menurut data tercatat lima provinisi di Indonesia yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yakni Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali (Poernomo, 2016).

Data penelitian menunjukkan bahwa sebesar 67,85% peserta didik berkebutuhan khusus memilih bekerja setelah lulus Sekolah Menengah Atas, sebesar 17,85% memilih kuliah, dan sebesar 3,57% ingin bekerja dan kuliah (Rizky, 2014). Kondisi itu didukung penelitian lain yang menunjukkan bahwa memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berdampak pada perkembangan yang signifikan (Tarnoto, 2016). Perkembangan ini dapat di tinjau dari kemandirian dalam menentukan pilihan bagi kebutuhan pribadinya sebagai wujud reformasi pendidikan tanpa deskriminasi (Mulyadi, 2017).

Pendidik memiliki peranan penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Kurniawati et al., 2012). Kompetensi pendidik dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak akan menghasilkan pendidikan inklusi yang berkualitas. Berdasarkan data penelitian, pendidik dalam setting pendidikan khusus hanya sebesar 13 % (Kantavong & Rerkjaree, 2017). Oleh karena itu pemerintah, masyarakat, dan orang tua diharapkan secara aktif berpartisipasi dan bekerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi berkualitas (Imaniah & Fitria, 2018; Wahyuningsih, 2016).

PEMBAHASAN

Pendidikan inklusi sejatinya telah diatur secara jelas dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Program pendidikan inklusi memfasilitasi seluruh peserta didik (Schmidt & Venet, 2012). Untuk mendukung tujuan tersebut terdapat beberapa model pendidikan inklusi seperti Model Fleksibel pada Layanan Pendidikan Khusus di Sekolah Dasar Setting Inklusif". Model ini dibangun dalam tiga dasar yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman implementasi

delapan Standar Pendidikan Nasional (SPN), dan prinsip implementasi model fleksibel (Aprilia, 2017).

Disamping itu, model kolaborasi pendidikan inklusi (Sulaiman, 2018) juga telah di terapkan untuk menunjang perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 (2) menyebutkan bahwa *warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus* (UU RI, 2003). Amanah tersebut pening agar selalu di perhatikan oleh pemegang kebijakan supaya menciptakan keadilan sosial sebagaimana terdapat pada sila kelima Pancasila.

Menejemen pendidikan inklusi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera di selesaikan. Kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi orang tua dan masyarakat yang rendah (Chairunnisa, 2017). Kemudian erkaitan dengan implementasi kebijakan, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi (Lukitasari et al., 2017) juga menjadi rasional pentingnya membentuk pola menejemen pendidikan inklusi yang profesional di indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan era peradaban. Kondisi yang ditawarkan era *society* 5.0 telah membawa dampak signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan. Pendidikan inklusi menjadi perhatian penting di era *society* 5.0 sebab memiliki potensi yang unik untuk dikembangkan. Pendidik dalam pendidikan inklusi memiliki kecendrungan konstruktivis sosial lebih dominan daripada guru pendidikan reguler (Sheehy et al., 2019). Hubungan kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat menjadi modal utama terbentuknya paradigma pendidikan inklusi yang profesional, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajisuksmo, C. R. P. (2017). Practices and Challenges of Inclusive Education in Indonesian Higher Education. *25th ASEACCU Conference on "Catholic Educational Institutions and Inclusive Education: Transforming Spaces, Promoting Practices, and Changing Minds". Assumption University of Thailand, Bangkok August*, 21–27.
- Al Faruqi, U. (2019). Future Service in Industry 5.0. *Jurnal Sistem Cerdas*, 2(1), 67–79.
- Aprilia, I. D. (2017). Flexible model on special education services in inclusive setting elementary school. *Journal of ICSAR*, 1(1), 50–54.
- Chairunnisa, C. (2017). *Challenge for School Management Inclusive in Indonesia Through Education Strategy*.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Efendi, M. (2018). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia for Children with Special Needs: Expectation and Reality. *Journal of ICSAR*, 2(2), 142–147.
- Imaniah, I., & Fitria, N. (2018). Inclusive education for students with disability. *SHS Web of Conferences*, 42, 39.
- Kantavong, P., & Rerkjaree, S. (2017). A comparative study of teacher's opinions relating to inclusive classrooms in Indonesia and Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 291–296.
- Kurniawati, F., Minnaert, A., Mangunsong, F., & Ahmed, W. (2012). Empirical study on primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Jakarta, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 69, 1430–1436.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Mudjito, A. K., & Ashar, M. N. (2017). Management of Inclusive School Curriculum in Indonesia. *9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET 2017)*.
- Mulyadi, A. W. E. (2017). Policy of

- Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 201–212.
- Poernomo, B. (2016). The implementation of inclusive education in Indonesia: current problems and challenges. *American International Journal of Social Science*, 5(3), 144–150.
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 99–110.
- Rakhmawati, D. (2017). Konselor Sekolah Abad 21: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 58–63.
- Rizky, U. F. (2014). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).
- Rondiyah, A. A., Wardani, N. E., & Saddhono, K. (2017). Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya untuk meningkatkan pendidikan karakter kebangsaan di era MEA (masayarakat ekonomi ASEAN). *Proceedings Education and Language International Conference*, 1(1).
- Schmidt, S., & Venet, M. (2012). Principals facing inclusive schooling or integration. *Canadian Journal of Education*, 35(1), 217.
- Sheehy, K., Budiyanto, Kaye, H., & Rofiah, K. (2019). Indonesian teachers' epistemological beliefs and inclusive education. *Journal of Intellectual Disabilities*, 23(1), 39–56.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Sulaiman, A. (2018). Promoting Collaborative Consultation to Improve the Quality of Inclusive Education in Indonesia. *Academic Journal Perspective: Education, Language, and Literature*, 6(2), 80–88.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat sd. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 13(1), 50–61.
- UU RI. (2003). Sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*.
- Wahyuningsih, S. (2016). Inclusive Education For Persons With Disabilities: The Islamic Perspective. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 4(1), 1–18.